

# **ISLAM LIBERAL DAN PERMASALAHANNYA: PENGALAMAN INDONESIA**

**Oleh : Republik Indonesia**

**Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D**

## **Pendahuluan**

Dalam pertemuan Musyawarah SOM ke-31 dan MABIMS ke-12 di Kuala Lumpur Malaysia, tanggal 28-30 November 2006, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui pidato Prof Dr. M Atho Mudzhar pernah menyampaikan paparannya mengenai Islam Liberal di Indonesia. Saat itu, presenter mengungkapkan bahwa pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang hukum Islam dan masalah-masalah lain sebenarnya belum tertuang secara lengkap, melainkan masih merupakan letupan-letupan pemikiran keagamaan yang sifatnya sporadis. Demikian pula kerangka metodologis berpikirnya juga belum tertuangkan secara utuh dan jelas. Karena itu, untuk menganalisisnya secara komprehensif tidaklah mungkin kecuali sekedar mendasarkan diri pada percikan-percikan pemikiran yang sepotong-sepotong itu.

Hingga hari ini, kehadiran Islam liberal di berbagai negara Islam dianggap merisaukan dan mengancam pandangan mainstream beragama umat Islam. Demikian juga di Indonesia, kehadiran Islam Liberal telah menimbulkan polemik baru terkait dengan beberapa permasalahan keagamaan. Kontroversi itu muncul seiring munculnya sebuah gerakan anak muda yang mendeklarasikan suatu yang disebut Jaringan Islam Liberal (JIL) yang berdiri sekitar tahun 2001. Prinsip yang dianut oleh Jaringan Islam Liberal yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. "Liberal" di sini bermakna dua: kebebasan dan pembebasan. Jaringan Islam Liberal percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Jaringan Islam Liberal memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu "liberal". JIL di Indonesia percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Sebabnya, mereka menekankan pada kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas.

Dalam konteks global, menurut Charless Kurzman, Islam liberal itu muncul pada sekitar abad ke-18 saat kerajaan Turki Utsmani Dinasti Shafawi dan Dinasti Mughal tengah berada digerbang keruntuhan. Pada saat itu ulama mengadakan gerakan pemurnian untuk kembali kepada al-Quran dan sunnah. Pada saat ini muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Syah Waliyullah (India, 1703-1762), menurutnya Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Hal ini juga terjadi di kalangan Syiah. Aqa Muhammad Bihbihani (Iran, 1790) mulai berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar.

Secara garis besar, Islam liberal di Indonesia dalam pandangan kami yang muncul dalam dua warna. Pada bentuk pertama, liberasi Islam muncul dalam bentuk pembaharuan paham dan pemikiran keagamaan. Kondisi yang pertama bermanfaat memberikan cara baru memahami ajaran dan nilai-nilai agama karena pendekatannya masih dalam kerangka metodologis yang dianggap standar. Kategori ini memunculkan model pembaharuan pemikiran yang banyak mengasosiasikan diri dengan gerakan-gerakan substantivis tahun 1970-an yang dimotori oleh Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, Goenawan Mohamad. Menurut Fachri Aly dan Bactiar Effendi (1986: 170-173) terdapat sedikitnya empat versi Islam liberal yang berkembang di Indonesia, yaitu modernisme, universalisme, sosialisme demokrasi, dan neo modernisme.

Modernisme mengembangkan pola pemikiran yang menekankan pada aspek rasionalitas dan pembaruan pemikiran Islam sesuai dengan kondisi-kondisi modern. Tokoh-tokoh yang dianggap mewakili pemikiran modernisme antara lain Ahmad Syafii Ma'arif, Nurcholish Madjid, dan Djohan Effendi. Adapun universalisme sesungguhnya merupakan pendukung modernisme yang secara spesifik berpendapat bahwa, pada dasarnya Islam itu bersifat universal. Betul bahwa Islam berada dalam konteks nasional, tetapi nasionalisasi itu bukanlah tujuan final Islam itu sendiri. Karena itu, pada dasarnya, mereka tidak mengenal dikotomi antara nasionalisme dan Islamisme. Keduanya saling menunjang. Masalah akan muncul kalau Islam yang me-nasional atau melokal itu menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hakikat Islam yang bersifat universal. Pola pemikiran ini, secara samar-samar terlihat pada pemikiran Jalaluddin Rahmat, M. Amien Rais, A.M. Saefuddin, Endang Saefudin Anshari dan mungkin juga Imaduddin Abdul Rahim.

Pola pemikiran sosialisme–demokrasi menganggap bahwa kehadiran Islam harus memberi makna pada manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Islam harus menjadi kekuatan yang mampu menjadi motivator secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Para pendukung sosialis-demokrasi melihat bahwa struktur sosial politik dan, terutama, ekonomi di beberapa negara Islam termasuk Indonesia, masih belum mencerminkan makna kemanusiaan, sehingga dapat dikatakan belum Islami. Proses Islamisasi, dengan demikian, bukanlah sesuatu yang formalistik. Islamisasi dalam refleksi pemikiran mereka adalah karya-karya produktif yang berorientasi kepada perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik menuju terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis. Adi Sasono, M. Dawam Rahardjo, serta Kuntowidjono dapat dimasukkan dalam pola pemikiran ini.

Neo modernisme mempunyai asumsi dasar bahwa Islam harus dilibatkan dalam proses pergulatan modernisme. Bahkan kalau mungkin, Islam diharapkan menjadi leading ism (ajaran-ajaran yang memimpin) di masa depan. Namun demikian, hal itu tidak berarti menghilangkan tradisi keislaman yang telah mapan. Hal ini melahirkan postulat (dalil) *al-muhâfazhat 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdu bi al-jadîd alashlah* (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik). Pada sisi lain, pendukung neo modernisme cenderung meletakkan dasar-dasar keislaman dalam konteks atau lingkup nasional. Mereka percaya bahwa betapapun, Islam bersifat universal, namun kondisikondisi suatu bangsa, secara tidak terelakkan, pasti berpengaruh terhadap Islam itu sendiri. Ada dua tokoh intelektual yang menjadi pendukung utama neo modernisme ini adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.

Tampaknya pemikiran Nurcholish (Prisma, nomor ekstra, 1984: 10-22), lebih dipengaruhi oleh ide Fazlur Rahman, gurunya di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Sedang pemikiran neo modernisme Abdurrahman Wahid telah dibentuk sejak awal karena ia dibesarkan dalam kultur ahlussunnah wal jama'ah versi Indonesia, kalangan NU. Karena itu, ide-ide keislamannya tampak jauh lebih empiris, terutama dalam pemikirannya tentang hubungan Islam dan politik. (Prisma, Nomor ekstra, 1984: 3-9; dan Prisma, 4 April 1984: 31-38).

Dalam bentuk yang kedua, liberasi Islam muncul dalam bentuk klaim melakukan kompromi terhadap perkembangan sains dan sikap terhadap realitas situasi dan kondisi. Kecenderungan kedua ini cenderung mengambil sikap pragmatis, memahami hubungan sains

dan agama secara fungsional, sehingga terkadang membenarkan perilaku sosial yang menyerempet persoalan-persoalan yang tidak lazim menurut agamawan seperti soal LGBT dan perkawinan sesama jenis kelamin.

Gerakan ini muncul setelah reformasi Indonesia, gerakan yang secara terang-terangan menyebut dirinya Islam liberal. Sejak akhir tahun 1990an muncul kelompok-kelompok anak muda yang menamakan diri kelompok "Islam Liberal" yang mencoba memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada akhir abad ke- 20. Islam liberal setelah reformasi ini lebih vulgar dan berani sehingga memaksa reaksi dari lembaga-lembaga keagamaan untuk mengeluarkan fatwa yang berusaha melawannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok ini, sehingga pada Munasnya yang ke-7 pada tanggal 25-29 Juli 2005 mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalism merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dari dua kecenderungan Islam liberal di atas, diakui memang ada aspek manfaat dan madharatnya. Dari aspek manfaat, pendekatan Islam liberal yang mencoba menggali dan mengkontektualisasikan agama secara substantif dan fungsional perlu menjadi catatan tersendiri, namun dari aspek madharatnya sebagian pandangan yang dikembangkan oleh Islam liberal belakangan terkesan berlebihan dan mencederai pemahaman keagamaan secara ijma'i atau lazim menurut logika mainstream umat beragama, atau bahkan menimbulkan kebingungan umat. Untuk kepentingan inilah, majlis mudhakarrah ini diadakan untuk mencermati kembali bentuk dan ekses-ekses yang ditimbulkan dari kehadiran Islam liberal ini.

### **Tujuan Kajian ini**

Sesuai dengan maksud dan tujuan pembahasan ini, tentunya semua pihak yang hadir di sini ingin mengetahui bagaimana pengalaman Indonesia menghadapi gerakan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh hadirnya Islam liberal ini. Memenuhi harapan ini, paparan dimaksudkan untuk menjelaskan posisi pemerintah Indonesia melalui pandangan dan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Secara umum, posisi kementerian agama RI terhadap permasalahan keagamaan di Indonesia sesuai tugas dan fungsi kementerian mengambil posisi sebagai kelembagaan negara yang ingin

memberikan pelayanan di bidang keagamaan dan tidak mengambil posisi sebagai pemutus dan pemberi fatwa final permasalahan keagamaan. Karena posisi terakhir menyangkut otoritas keagamaan di Indonesia diserahkan atau menjadi wilayah majlis agama dan lembaga keagamaan seperti melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Batsul Masail di lingkungan organisasi keummatan Nahdlatul Ulama (NU), atau Majelis Tarjih Muhammadiyah.

### **Isu-isu Keagamaan yang dihadapi Indonesia**

Indonesia, setelah memasuki era reformasi (1998), terjadi perkembangan demokrasi yang luar biasa. Demokrasi yang terbuka selain memberikan manfaat yang luas, diakui Indonesia juga harus menghadapi beberapa eksekutif negatif sebagai efek samping dari demokrasi terbuka.

Sebagai contoh, dalam masalah paham keagamaan, demokrasi telah semakin membukakan mata bahwa Islam moderat (Islam wasathiyah) merupakan pilihan realistis untuk Indonesia. Ada yang membahasakan Islam wasathiyah ini dengan gagasan "Islam Nusantara" di kalangan Nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama), ada juga yang dengan gagasan "Islam Indonesia Berkemajuan" di kalangan warga Muhammadiyah, dan ada juga yang mencoba menggabungkannya "Islam Nusantara Berkemajuan" seperti yang diusulkan Prof Dr Azyumardi Azra.

Namun di sisi lain, Indonesia harus menghadapi munculnya paham keagamaan yang berkecenderungan ke paham keagamaan yang ekstrim. Paham ini menjelma dalam dua kutub, yaitu satu kutub paham keagamaan yang atas nama menjunjung rasionalitas dan sains menyebarkan paham yang berbeda dengan paham mainstream umat, bahkan terkesan berlebihan. Paham ini digagas oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam Liberal. Dari kutub yang lain, menguatnya paham keagamaan yang cenderung tektualis yang mengarah ke arah sikap radikal, tidak menutup kemungkinan intoleran dan dalam beberapa kasus menghalalkan pendekatan teror (terorisme).

Sedikit melihat Islam Liberal di Indonesia, menurut Greg Barton, beberapa karakteristik pemikiran Islam liberal di Indonesia antara lain: 1) senantiasa mengusung semangat ijtihad; 2) mengusung rasionalisme; 3) menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi; 4) menjunjung tinggi peran ilmu pengetahuan; 5) memandang bahwa keinginan mendirikan "negara Islam" adalah pengalihan perhatian yang merugikan; 6) menerima dan mendukung pluralisme masyarakat; 7) memegang prinsip-prinsip

humanitarianisme, bahkan memandangnya sebagai esensi dan jantung Islam; 8). memperjuangkan kesetaraan gender.

Jika pengamatan Greg Barton itu benar, maka pemikiran Islam liberal nampaknya positif untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Tetapi dari kesimpulan itu, nampaknya Greg Barton terlalu bersimpati terhadap pemikiran Islam liberal, atau ia sebenarnya tidak berpikir mengenai Islam liberal sebagai suatu kelompok atau jaringan, melainkan hanya sebagai suatu kecenderungan pemikiran.

Ia juga tidak secara eksplisit membedakan antara liberalisasi pemikiran Islam, dan pembaharuan pemikiran Islam, yang biasa disandang oleh kaum modernis. Tentu saja, liberalisasi berbeda dengan pembaharuan. Dalam pembaharuan, yang ada ialah reformulasi pemikiran Islam terhadap teks-teks suci (nash) yang ada. Sedangkan dalam liberalisasi terkandung makna keberangkatan (departure) dari teks suci (nash). Dengan kata lain, dalam liberalisme ada unsur meninggalkan nash. Salah satu eksese reformasi di bidang keagamaan yang dihadapi adalah paham Islam liberal yang berlebihan (ghuluw) yang meresahkan pandangan mayoritas umat beragama inilah yang ditentang oleh MUI.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) tegas-tegas menolak paham liberalisme. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme Dan Sekularisme Agama. Fatwa MUI tentang Pluralism, Sekularisme dan Liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme Sekularisme dan Liberalisme Agama. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampur adukan aqidah dan ibadah umat islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah social yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Nahdlatul Ulama menyebutkan tiga poin pandangan Islam Liberal yang tidak sesuai dengan konteks ideologi NU. Ketiga ajaran tersebut antara lain, 1. Pernyataan bahwa semua agama itu benar, 2. Desakralisasi Al Qur'an, 3. Deuniversalisasi Al Qur'an. NU tetap menolak pandangan maupun ajaran Jaringan Islam Liberal (JIL). Juru

Bicara Forum Kiai Muda (FKM) Jawa Timur KH Abdullah Syamsul Arifin mengatakan dengan tegas bahwa NU secara institusi tidak sepakat dengan ajaran JIL. Sikap tegas NU terhadap JIL sudah terlihat nyata saat diadakannya Mukdam NU 2004 di Boyolali dan Munas NU 2006. NU menganggap ajaran JIL telah menyimpang dari Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Ajaran yang disampaikan para tokoh Islam Liberal merupakan wacana kosong belaka. Sebab saat ditanyai mengenai tiga poin ajarannya tersebut, para tokoh Islam Liberal tidak bisa menjelaskan dalil-dalil yang dipakainya dengan baik dan lengkap. Tokoh Islam Liberal hanya mengutip dalil itu sepotong-sepotong untuk mendukung pemikirannya saja. Ada dalil yang dikutip tidak lengkap.

Muhamadiyah Secara Tersirat juga menolak Islam Liberal. Mantan pemimpin Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam buku berjudul "Pemikiran Muhammadiyah: Respons Terhadap Liberalisasi Islam, (Surakarta: UMS, 2005), Din menyatakan, bahwa Muhammadiyah "tidak sejalan dengan paham ekstrem rasional dikembangkan Islam Liberal, meski beberapa oknum terutama di kalangan muda atau yang merasa muda ikut-ikutan berkubang di jurang "liberalisme Islam". Dalam buku ini menegaskan sikap Muhammadiyah yang ingin mengambil "posisi tengah" yang secara teologis merujuk kepada al-Aqidah al-Wasithiyah. Secara tegas, mengkritik penjiplakan membabi buta terhadap paham rasionalisme dan liberalisme, termasuk di kalangan Muhammadiyah. Begitu juga ketika datang tawaran pemikiran rasionalisme dan liberalisme, tidak sedikit generasi muda Muhammadiyah, dan mereka yang masih merasa muda, terseret dalam arus liberalisme dan rasionalisme tersebut. Muncul di sementara generasi Muhammadiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya lokal (Arab), sehingga seluruh isinya adalah zhanni. Dakwah Islam, bukanlah mengajak manusia untuk ber-Islam, baik kepada yang sudah muslim apalagi yang belum muslim, dakwah tidak mengurus keyakinan dan iman seseorang, tetapi hanya menata kehidupan yang harmonis diantara berbagai keyakinan dan mengatasi berbagai problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya.

Sementara itu, Indonesia juga menghadapi gerakan ekstrim yang lain yang bahkan berseberangan dengan warna Islam liberal, yaitu paham Islam intoleran, radikal atau bahkan menghalalkan aksi teror dan terorisme. Hal ini seperti diingatkan, Shinta Nuriyah Abdurahman Wahid, Istri Presiden ke-4 RI, saat ini gerakan ini sudah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian mereka memiliki rasa benci terhadap non muslim, etnis Tionghoa, dan

juga sesama muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Beberapa peristiwa aksi bom bunuh diri atas nama agama terjadi di Indonesia seperti Bom Bali, Bom Kuningan, Bom Thamrin menunjukkan kesinambungan paham dan gerakan Islam ekstrim ini.

Pembacaan adanya dua kecenderungan ekstrim di atas juga diamini oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam rilisnya (Kiblat, 27/8/2015), MUI melihat munculnya kelompok yang eksklusif, intoleran, kaku/rigid, mudah mengkafirkan orang dan kelompok lain, mudah menyatakan permusuhan dan melakukan konflik, bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama Muslim yang tidak sepaham. Di sisi lain, muncul pula kelompok yang cenderung permisif dan liberal. Kedua kelompok tersebut tergolong kelompok tatharruf *yamini* (ekstrem kanan) dan *yasari* (ekstrem kiri), yang bertentangan dengan wujud ideal dan tepat dalam melaksanakan ajaran Islam di Indonesia dan dunia. Pemikiran dan paham keagamaan serta ideologi dan gerakan kedua kelompok tersebut tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan dibangun bangsa Indonesia.

Menghadapi dua kecenderungan paham keagamaan ekstrim ini, baik islam liberal dan islam radikal, pemerintah Indonesia bersama pimpinan dan lembaga keagamaan menghadapinya secara terpadu, yaitu dengan cara melakukan moderasi pemahaman keagamaan secara terus menerus, tanpa mengenal rasa lelah. Sekaligus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dalam sejarahnya adalah bangsa yang kosmopolitan yang selalu siap menerima perbedaan dan menghindari konflik yang menimbulkan korban.

### **Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia**

Kementerian agama sebagai lembaga negara sesuai dengan PMA NO 42 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Indonesia sekalipun bukan negara agama, namun memposisikan agama dalam posisi yang sangat tinggi yaitu sebagai salah satu sumber nilai-nilai dalam berbangsa. Karena itu dalam mensikapi dinamika keagamaan di negara ini, pemerintah Indonesia lebih memposisikan sebagai mediator, titik temu dan titik simpul dari kesadaran warganya dalam beragama dan berbangsa.

Kementerian Agama Indonesia lebih mengutamakan sikap keberagaman yang moderat dalam setiap program pembangunannya. Menteri Agama belakangan menegaskan kembali peran kementerian ini dalam mensikapi munculnya berbagai paham keagamaan yang ekstrim

seperti liberalisme maupun paham keagamaan yang cenderung tekstualis.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pidato dalam sebuah acara di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (7/3/2018) menegaskan tentang pentingnya sikap keagamaan yang moderat. Menurutnya salah satu misi utama Kementerian Agama Republik Indonesia adalah untuk bagaimana agama yang dipahami dan diamalkan oleh seluruh bangsa dengan paham dan bentuk pengamalan keagamaan yang moderat. Untuk membangun pemahaman keagamaan yang moderat, maka dibutuhkan langkah-langkah memperjuangkan moderasi agama. Moderasi itu artinya proses menuju moderat lawan dari ekstrim, Kementerian Agama Indonesia tidak ingin di negara Indonesia ada paham apalagi pengamalan agama yang ekstrim atau berlebihan.

Untuk keluar dari ekstremitas di antara dua kutub, maka jalan yang paling bijak adalah sikap yang pasti melalui pilihan di tengah-tengah, yaitu paham keagamaan yang moderat atau sering kami menyebutnya "Islam Wasathiyah". Terkait usaha untuk membangun moderasi keagamaan, Kementerian Agama telah melakukan berbagai usaha dan strategi diantaranya:

1. Kementerian Agama terus melakukan langkah-langkah penanggulangan menyebarnya pemahaman ekstrim, radikal, dan gerakan terorisme melalui kerjasama lintas kementerian dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kemenag dengan Kemendikbud dan BNPT tentang Pencegahan Penyebaran Paham Radikal dan Intoleransi, di Jakarta, Kamis (19/07/2018).
2. Melalui Badan Litbang dan Diklat, Kementerian agama mendiseminasikan dan mempromosikan Islam wasathiyah ke dalam dan luar negeri. Ke dalam negeri dengan melakukan pendidikan dan latihan bagi peserta diklat, ke luar negeri melalui Halaqah Ulama Asean yang diselenggarakan di Bogor, 17-19 Oktober 2016 yang dihadiri utusan dari Malaysia, Brunai, Singapura dan Thailand yang menghasilkan Komitmen Bogor yang poin pertamanya: *"Mensosialisasikan Islam Wasathiyah sebagai penjabaran Islam rahmatan lil alamin."*
3. Melalui pesantren, Kementerian agama mendorong terus agar pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang otentik nusantara menjaga dirinya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal Islam wasathiyah sebagaimana yang diperankan oleh "Ulama Jawi" terdahulu dalam mengembangkan Islam yang damai di wilayah yang saat ini disebut Asean ini.

4. Melalui perguruan tinggi, Kementerian Agama membuat pusat kajian moderasi kajian agama islam dalam rangka merespon sedang terjadi proses radikalisisasi.
5. Melalui pendidikan sekolah, Kemenag telah mengambil langkah antisipatif diantaranya dengan melatih 10 ribu guru dan pengawas agar bisa memberikan pemahaman Islam yang moderat.
6. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama mengajak umat Islam, Kristen, Katolik, hindu, Buddha dan Konghucu untuk terus mengembangkan paham keagamaan yang moderat dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Langkah-langkah pemerintah ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai organisasi tokoh-tokoh agama dari berbagai organisasi keagamaan yang ada di Indonesia abik NU, Muhammadiyah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, telah merumuskan prinsip-prinsip Islam Wasathiyah dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX di Surabaya, 24-27 Agustus 2015. Islam Wasathiyah dinilai sebagai ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi segenap alam semesta didefinisikan sebagai berikut:

1. *Tawassuth*(mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).
2. *Tawazun*(berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan) dan *ikhtilaf* (perbedaan).
3. *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. *Musawah*(egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
6. *Syura*(musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. *Ishlah*(reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'amah*) dengan tetap berpegang pada prinsip al-

*muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah.*

8. *Aulawiyah*(mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
9. *Tathawwur wa Ibtikar*(dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.
10. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

Diseminasi Islam wasathiyah terus disambut oleh organisasi lain, seperti Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA). Organisasi ini dalam konferensinya yang berlangsung 26-29 Juli 2018 di Lombok, NTB, telah menghasilkan 9 butir rekomendasi yang disebut Lombok Message dalam mengukuhkan "Moderasi Islam dalam Perspektif Ahlussunnah wal Jam'ah". Isi lombok message itu sebagai berikut:

1. Para peserta konferensi bersepakat bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang berpegang teguh pada Alquran dan Sunnah, yaitu para pengikut Asy'ariyyah-Maturidiyyah, para fukaha, ahli hadis dan tasawuf yang mengikuti Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
2. Konsep "al-firqah al-nâjiyah" (kelompok yang selamat) seperti disebut dalam beberapa riwayat dan menjadi salah satu pemicu perpecahan umat Islam, adalah masalah khilafiah yang belum disepakati para ulama. Riwayat-riwayat hadis tentang itu masih diperdebatkan para ulama, baik dari periwayatan (sanad) maupun substansinya (matan), terutama yang terkait dengan prediksi di akhirat bahwa "semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok". Ini masalah akidah yang harus didasari pada hadis-hadis yang mutawatir. Konsep ini tidak bertentangan dengan perbedaan dan keragaman dalam pandangan keagamaan, dan tidak bertolak belakang dengan perintah untuk menjaga persatuan.
3. Sektarianisme, rasisme dan diskriminasi dalam bentuk apa pun bertentangan dengan wasathiyah (moderasi) Islam, dan harus dilawan dengan berbagai cara, sebab mengganggu keutuhan Tanah

Air, memperkeruh harmoni sosial antara warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara. Wasathiyah Islam menjamin hak untuk berbeda, dan menjamin hak kebebasan penganut agama lain dalam menjalankan agama dan beribadah sesuai keyakinannya.

4. Al-Azhar al-Syarif adalah garda depan wasathiyah Islam sepanjang sejarah, lebih dari seribu tahun, dengan metode yang mengakui dan mengukuhkan keragaman, menghormati pandangan dan sikap orang lain yang berbeda, tanpa menuduhnya kafir (takfir), fasiq (tafsiq), dan berbuat bid'ah (tabd'i).
5. Perlu membangun konsep pemikiran, bimbingan dan pendidikan bagi mereka yang keluar dari jalur wasathiyah, yaitu penganut pemikiran ekstrem yang kembali (returnis) dari daerah-daerah konflik, agar dapat menjadi warga negara yang baik. Al-Azhar al-Syarif dan para ulamanya serta kantor-kantor cabang Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) yang tersebar di beberapa negara siap melakukan itu.
6. Perlu membuat desain program pendidikan yang dibangun atas dasar wasathiyah Islam dan nir-kekerasan, dengan target sasaran anak-anak yang akan menjadi harapan masa depan, dalam upaya membangun dan melindungi mereka dari pemikiran ekstrem yang bertentangan dengan wasathiyah.
7. Wasathiyah Islam adalah metode dalam beribadah, bermuamalah, praktik ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Selain itu, wasathiyah adalah solusi dalam menghadapi Islamofobia yang muncul akibat beberapa aksi terorisme, pertumpahan darah dan problematika lainnya.
8. Perlu menyelenggarakan seminar dan konferensi, serta memanfaatkan berbagai media sosial dalam melakukan propaganda wasathiyah dan counter pemikiran ekstrem. Selain itu, juga perlu memberikan bimbingan bagi pemuda Muslim terkait situs-situs internet yang menyebarkan pemikiran ekstrem dan kekerasan.
9. Wasathiyah Islam memanusiakan dan memuliakan manusia, terlepas dari perbedaan agama dan keyakinan, menanamkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh penduduk suatu negara, menegaskan persatuan Tanah Air dan menanamkan loyalitas terhadap negara. Indonesia telah mengambil inisiatif baik dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai dasar negara yang

tercermin dalam Pancasila. Oleh karenanya, perlu terus dijaga dan dirawat.

## **Penutup**

Sebagai penutup, pengalaman Indonesia telah mencermati keberadaan Islam liberal dari kemungkinan jatuh pada gerakan yang berlebihan/ghulluw/ekstrim. Karena itu Islam liberal dengan segala permasalahannya yang mengarah ke bentuk ekstrims di Indonesia tidak berdiri sendiri sebagai permasalahan utama kehidupan keagamaan di Indonesia, seperti muncul paham ekstrim lain yang membenarkan langkah radikal atau bahkan tindakan teror. Kemunculan dua bentuk paham ekstrims ini, menurut hemat kami, tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di antara anggota Mabims.

Untuk itu dalam rangka menghadapinya, usulan kami, kita perlu bersama-sama merevitalisasi kembali bentuk kehidupan keagamaan yang khas timur (Asean) yang moderat, kosmopolitan dan berkemajuan. Hal itu bisa diwujudkan dengan mengarus utamakan kembali Islam moderat (Islam Wasathiyah) pada negara masing-masing dan menindaklanjuti dalam aksi bersama dalam berbagai program dan kegiatan.

Brunai Darussalam, Nopember 2018

